

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki perairan yang sangat luas yang terbentang dari wilayah Pulau Sabang sampai Merauke serta memiliki berbagai potensi dari sumber daya kelautan yang harus dikelola secara berkelanjutan dan optimal. Indonesia terdiri atas sekitar 17.508 buah pulau dengan garis pantai sepanjang sekitar 95.181 Km. Total luas wilayah Indonesia tersebut adalah sekitar 9 juta km² yang terdiri atas 2 juta km² daratan dan 7 juta km² lautan yang terbentang dari barat ke timur sepanjang 5.110 km dan dari utara ke selatan sejauh 1.888 km (Kusmana, 2008:5).

Indonesia merupakan pusat lalu lintas maritim antar benua karena menempati posisi geografis kepulauan yang strategis. Kedaulatan terhadap wilayah laut yang dimiliki Indonesia meliputi perairan pedalaman, perairan nusantara, dan laut teritorial. Indonesia juga memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang termasuk dalam zona tambahan. Selain itu, ada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sejauh 200 mil dari garis pangkal, dimana Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam (perikanan), kewenangan untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan, pemberian ijin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan- bangunan lainnya (Lasabuda, 2013:93).

Dengan wilayah air yang jauh lebih luas dibanding daratan, serta posisi silang yang strategis, sudah sewajarnya apabila Indonesia memiliki kepentingan

untuk menguasai dan memanfaatkan laut, memiliki identitas dan budaya maritim yang kuat, serta memanfaatkan posisi strategis untuk kemaslahatan bangsa dan menciptakan keamanan di kawasan. Hal ini sesuai dengan alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Keberadaan keberagaman kepulauan yang ada, menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan baik dari sisi sumber daya alam, sumber daya manusia, kebudayaan dan adat istiadat yang khas dan beragam di setiap daerahnya. Keberadaan pulau-pulau yang ada tersebut sudah seharusnya dikelola dan menjadi kewenangan Pemerintah daerah. Kewenangan untuk mengurus dan mengelola suatu daerah disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah bermakna Pelimpahan urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri yang menyangkut kepentingan masyarakat daerah tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan lahirnya undang-undang tersebut maka daerah berpeluang besar untuk mengelola sumber daya yang ada agar memberikan

keuntungan dan hasil yang optimal serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut adalah dengan cara mengoptimalkan dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada di wilayah tersebut. Pengembangan kepariwisataan pada umumnya diarahkan sebagai sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan pengenalan dan pemasaran produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan wisata harus merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat (Razak, Suzana, Kapantow, 2017:278).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan pada Pasal 1 ayat 4, kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai bentuk kebutuhan setiap orang, negara dan interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, serta sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat harus saling berkoordinasi serta mendukung adanya keberadaan pariwisata di suatu wilayah.

Pariwisata Indonesia berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, untuk itu dalam perencanaan pengembangan pariwisata harus melibatkan

masyarakat setempat di sekitar destinasi wisata yang lebih mengetahui kondisi potensi destinasi di daerahnya (Ridwan:2012).

Sektor pariwisata sebagai suatu kegiatan ekonomi memiliki mata rantai yang sangat panjang sehingga banyak menampung kesempatan kerja bagi masyarakat sekitarnya yang selanjutnya akan menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat dari hasil penjualan barang dan jasa melalui usaha restoran, hotel, biro perjalanan, penjualan barang cinderamata dan sebagainya. Semakin banyak wisatawan yang datang maka akan semakin banyak devisa yang diterima dan pada akhirnya akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana wisata lainnya (Razak, Suzana, Kapantow, 2017:278).

Sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga pemerintah mempertimbangkan sektor pendukung pembangunan nasional dan penggerak ekonomi rakyat berasal dari sektor pariwisata. Kontribusi yang cukup besar dari sektor pariwisata, menyebabkan pemerintah menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor pendukung pembangunan nasional dan penggerak ekonomi rakyat. Potensi wisata yang cukup besar serta sarana yang relatif tersedia di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mardani, Purwanti, Rudiyan, 2017:2).

Perkembangan sektor wisata dalam beberapa dekade terakhir mengalami peningkatan yang pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memudahkan para wisatawan untuk menentukan destinasi wisatanya. Kondisi tersebut dapat dijadikan peluang bagi daerah yang memiliki potensi

wisata. Pemanfaatan potensi wisata akan memberikan dampak dalam meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana hasil penelitian tentang Kajian Kualitas Lingkungan dan Kesesuaian Wisata Pantai Tanjung Pesona Kabupaten Bangka (Margonggo, Anggoro, Purnaweni, 2013:356)

Indonesia memiliki destinasi wisata yang beragam di setiap daerahnya baik dari segi wisata darat, wisata laut, wisata alam maupun wisata budaya atau wisata religi yang menghasilkan keindahan dan keanekaragaman destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu daerah yang memiliki tempat wisata yang dapat menarik para wisatawan baik lokal maupun mancanegara adalah Kabupaten Demak. Pariwisata di Kabupaten Demak merupakan salah satu sektor yang strategis dan potensial untuk dikelola, dikembangkan dan dipasarkan, mengingat potensi obyek wisata yang dimiliki Kabupaten Demak sangat beragam, sebagaimana ditunjukkan oleh Probowati, Hanim dan Wahyu (2015:2) dalam hasil penelitian mereka tentang Identifikasi Faktor Penentu Pengembangan Obyek Wisata Di Kabupaten Demak.

Kabupaten Demak memiliki berbagai destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Kabupaten Demak memiliki potensi obyek wisata cukup besar yang mempunyai daya tarik wisata untuk dikunjungi oleh wisatawan. Di kabupaten ini terdapat wisata alam, wisata buatan dan wisata religi. Wisata religi yang terkenal adalah makam Sunan Kalijaga yang merupakan salah seorang wali, selain masjid Agung Demak yang bersejarah. Berhubung Demak mempunyai wilayah pantai, maka kabupaten ini juga memiliki beberapa area wisata pantai yaitu antara lain

wisata Pantai Morosari di Sayung, Pantai Morodemak, Pantai Istambul di Tambakbulusan, Wisata Mangrove di Kedungmutih dan Taman Ria beberapa wisata budaya di daerah tertentu dan pada waktu tertentu (Probowati, Hanim, Wahyu, 2015:2). Berikut adalah tabel data pengunjung obyek wisata di Kabupaten Demak pada tahun 2018.

Tabel 1. 1

Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Demak Tahun 2013-2018

Tahun	Dalam Negeri	Luar Negeri	Jumlah
2013	1.540.025	837	1.540.862
2014	1.537.388	676	1.535.064
2015	1.489.585	467	1.490.052
2016	1.571.315	571	1.517.886
2017	1.671.707	805	1.672.512
2018	1.724.710	1.423	1.726.133

Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka 2019

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengunjung yang datang ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Demak dari tahun 2013 sampai tahun 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami penurunan pengunjung, tetapi pada tahun 2016 sampai tahun 2018 pengunjung selalu mengalami peningkatan.

Kabupaten Demak sendiri memiliki 4 (empat) obyek wisata utama yang paling sering dikunjungi oleh para wisatawan, yaitu wisata Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga Kadilangu, Pantai Morosari dan Taman Ria. Keempatnya merupakan tempat-tempat wisata yang populer karena keberadaannya telah diketahui secara luas sehingga pengunjung yang datang selalu ramai.

Menurut informasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Demak pada tahun 2018 tercatat 1.726.133 orang yang mengunjungi obyek wisata, meningkat 3,2 % bila dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 1.672.512 pengunjung dengan rincian pada tabel 1.2

Tabel 1. 2

Pengunjung Empat Objek Wisata Utama di Kabupaten Demak Tahun 2018

No	Objek Wisata	Jumlah Pengunjung	Jumlah Pendapatan
1.	Masjid Agung	665.805	Rp. 665.805.000
2.	Makam Sunan Kalijaga Kadilangu	994.215	Rp. 497.107.500
3.	Pantai Morosari	20.694	Rp. 160.051.000
4.	Taman Ria	43.771	Rp. 560.069.000
Jumlah		1.726.133	Rp. 1.883.032.500

Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka 2019

Dalam tabel 1.2 menunjukkan bahwa pariwisata di Kabupaten Demak yang paling diminati adalah dari sisi wisata religinya, karena Kabupaten Demak dijuluki sebagai Kota Wali. Sejalan dengan julukan yang dimiliki oleh Kabupaten Demak yaitu Demak Kota Wali, dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa wisata religi di Masjid Agung dan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu merupakan objek wisata yang paling banyak dikunjungi dibandingkan dengan objek wisata lainnya.

Pariwisata di Kabupaten Demak tidak hanya dari sisi wisata religi saja, namun pariwisata yang juga menarik adalah pariwisata bahari. Wisata Bahari merupakan jenis pariwisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi bentang alam yang berupa wilayah laut dan wilayah pesisir yang dapat memberikan pengaruh terhadap ekonomi serta peningkatan taraf hidup bagi masyarakat yang

tinggal di sekitar wilayah tersebut. Aktivitas wisata bahari yang dapat dilakukan antara lain berenang, memancing, berperahu, olahraga pantai, *diving*, *snorkeling* serta menikmati atmosfer laut. Wisata bahari saat ini menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, karena merupakan kesempatan kepada wisatawan untuk memperoleh pengalaman mengenai lingkungan alam dan sosial, sehingga masyarakat lokal perlu untuk memahami potensi sumberdaya alam yang ada dalam kawasan wisata mereka (Mardani, Purwanti & Rudiyantri, 2017:2).

Salah satu pantai sebagai destinasi wisata bahari yang ada di Kabupaten Demak adalah Pantai Glagah Wangi. Pantai Glagah Wangi sering disebut dengan Pantai Istambul yang merupakan singkatan dari Istana TambakBulusan karena terletak di Desa Tambakbulusan, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Pantai ini belum banyak diketahui keberadaannya oleh para wisatawan baik dari wilayah Kabupaten Demak maupun luar wilayah Kabupaten Demak.

Pantai Glagah Wangi atau Pantai Istambul sejauh ini belum merupakan pantai yang terkenal di kalangan para pengunjung wisata apabila dibandingkan dengan Pantai Morosari yang terletak di Kecamatan Sayung yang keberadaannya telah diketahui oleh para wisatawan baik wisatawan lokal maupun luar wilayah Kabupaten Demak. Pantai Morosari telah lebih dahulu dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Demak dan dapat berkembang dengan cukup baik sehingga pengunjungnya selalu ramai. Walaupun saat ini Pantai Glagah Wangi belum terkenal di kalangan para pengunjung wisata, akan tetapi Pantai Glagah Wangi merupakan pantai yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak melalui Peraturan Daerah Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019-2029, yang memasukkan Pantai Glagah Wangi sebagai salah satu Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP).

Sebagai salah satu destinasi wisata yang masih relatif baru, maka pantai ini perlu dikembangkan, sehingga penelitian ini membahas tentang strategi pengembangan pariwisata Pantai Glagah Wangi Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Kaitannya dengan Ilmu Administrasi Publik adalah pemerintah seharusnya berperan sebagai perencana, pelaksana, dan fasilitator pembangunan pariwisata untuk menjamin terlaksananya pembangunan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, dengan cara menetapkan strategi untuk menarik kehadiran wisatawan untuk berkunjung.

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Demak dengan pengelolaan yang baik akan berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung, sehingga menyebabkan peningkatan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD). Sejauh ini pariwisata yang menonjol di Kabupaten Demak adalah dari sisi pariwisata religinya seperti di Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu. Sedangkan untuk wisata bahari seperti Pantai Glagah Wangi masih belum begitu diperhatikan dan dikembangkan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul **“Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Glagah Wangi Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Glagah Wangi di Kabupaten Demak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis strategi dalam pengembangan Pantai Glagah Wangi di Kabupaten Demak

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak mengenai apa yang harus dilakukan dengan adanya strategi pengembangan Pariwisata Pantai Glagahwangi di Kabupaten Demak.
2. Bagi peneliti, digunakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu- ilmu yang telah di dapat selama perkuliahan.
3. Bagi pembaca, digunakan sebagai bahan referensi dan juga bacaan ilmiah dalam pengkajian mengenai strategi pengembangan Pariwisata Pantai Glagahwangi di Kabupaten Demak.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah tabel yang berisi penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

Tabel 1. 3

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Tahun	Tujuan	Hasil
1.	Arif Mardani, Frida Purwanti, Siti Rudiyantri. "Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Pulau Pahawang Provinsi Lampung". (2017)	Mengetahui potensi sumberdaya di Pulau Pahawang yang menjadi daya tarik wisata, mengetahui tingkat persepsi, partisipasi, aspirasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata, dan untuk menyusun strategi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di pulau Pahawang Propinsi Lampung.	Potensi ekowisata Pulau Pahawang terdiri dari pesisir pantai, terumbu karang dan hutan mangrove. Pengamatan kesesuaian lahan pantai didapatkan nilai 95% sehingga Pulau Pahawang sangat sesuai untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Persepsi responden terkait pengembangan ekowisata di pulau Pahawang cukup baik, persepsi 40% masyarakat, dan persepsi pengunjung 44%. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata sudah cukup baik (45%), sedangkan partisipasi pengunjung dalam menjaga kebersihan pulau Pahawang sudah baik (62%). Aspirasi terhadap pengembangan ekowisata Pulau Pahawang yang meliputi akses transportasi, promosi, fasilitas umum, biaya perjalanan dan dukungan pemerintah sudah cukup baik, aspirasi masyarakat sebesar 50% sedangkan pengunjung sebesar 59%. Strategi dalam pengembangan wisata pantai Pulau Pahawang yaitu berada ppada posisi strategi Strength-Opportunities (SO) dengan prioritas strategi yaitu pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dengan pendampingan lembaga dan pemerintah.
2.	Fitridamayanti Razak Benu Olfie L. Suzana Gene H. M. Kapantow. "Strategi Pengembangan Wisata Bahari Pantai Malalayang Kota Manado Sulawesi Utara". (2017)	Merumuskan Strategi Pengembangan Wisata Bahari Pantai Malalayang Kota Manado.	Strategi pengembangan Wisata Bahari Pantai Malalayang berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, terletak pada posisi kuadran I atau strategi melalui integrasi horizontal, yang terletak antara peluang eksternal dan kekuatan internal. Hal ini merupakan strategi utama untuk mengembangkan kawasan wisata dengan cara membangun dan memperluas potensi wisata yang ada guna meningkatkan daya Tarik wisata yang tinggi, dengan cara menjaga

			sumberdaya keanekaragaman hayati dan biota laut yang dimiliki Pantai Malalayang, mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana obyek wisata, dan mengembangkan wisata kuliner yang menjadi pelengkap wisata pantai.
3.	Deby Marlina Nainggolana, I Made Adi Kampana. "Strategi Pengembangan Pantai Sawangan sebagai Daya Tarik Wisata Nusa". (2015)	Menghasilkan suatu hasil dan sasaran seperti yang diharapkan baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup yang nantinya dapat membantu kehidupan ekonomi masyarakat sekitar desa adat Peminge Banjar Sawangan.	Strategi yang digunakan yaitu memberdayakan masyarakat dalam pengembangan pariwisata baik dari segi peluang kerja serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan agar Pantai Sawangan tidak mengalami kerusakan di kemudian hari. Selain itu juga, strategi yang dapat diambil adalah dengan menambahkan fasilitas-fasilitas pendukung pariwisata agar dapat menjadikan Pantai Sawangan sebagai salah satu daya tarik yang wajib dikunjungi oleh wisatawan.
4.	Elrin Meivian Mongi, Frida Purwanti1 , Bambang Sulardiono. "Strategi Pengembangan Obyek Wisata Alam Pantai Suwuk Kabupaten Kebumen Jawa Tengah". (2015)	Belum banyak penelitian dan data tentang potensi sumber daya alam pantai suwuk, sehingga membutuhkan informasi tentang potensi pengelolaan harus dilakukan secara spesifik dan berkesinambungan	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pantai Owa Suwuk memiliki luas 5,5 ha dengan 3 formasi tumbuhan pantai yaitu <i>mangrove</i> , <i>pescaprae</i> , dan <i>barringtonia</i> . Potensi daya tarik wisata Pantai Suwuk meliputi wisata alam dan buatan dengan 9 atraksi yaitu pemandangan alam, museum pesawat terbang, penyewaan perahu, kuliner, kebun binatang, penyewaan atv, rekreasi berenang, berkuda, dan memancing. Strategi prioritas dan alternatif pengembangan wisata meliputi pengembangan kompetensi, pengembangan fasilitas, keterlibatan masyarakat, peningkatan kerjasama, peningkatan pemahaman lingkungan, peningkatan peran lembaga, peningkatan konsep pariwisata alam, pengembangan wisata edukasi, dan pengelolaan sampah serta kebersihan.
5.	Dariusman Abdillah "Pengembangan Wisata Bahari di Pesisir Pantai Teluk Lampung".	Menggambarkan pandangan dasar mengenai strategi yang diperlukan untuk mengembangkan daerah tujuan wisata di	Persepsi wisatawan terhadap wisata bahari di pesisir pantai Teluk Lampung yaitu melakukan peningkatan pendukung aktivitas wisata seperti hotel, penginapan, jasa keuangan, jasa kesehatan, banyak terpusat di ibukota

	(2016)	<p>pesisir Teluk Lampung agar lebih baik dari saat ini.</p>	<p>provinsi yaitu Bandar Lampung. Perlu adanya hotel atau <i>home stay</i> yang berada dalam wilayahnya sehingga mempermudah wisatawan yang ingin tinggal berlama-lama.</p> <p>Strategi-strategi pengembangan wisata bahari di pesisir Pantai Teluk Lampung adalah melakukan <i>diversifikasi</i> atraksi dan aktivitas wisata dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjawab tingginya permintaan atraksi dan aktivitas wisata sebagai dampak dari pesatnya perkembangan sektor pariwisata, mempertahankan keunikan daya tarik wisata yang menjadi faktor penarik wisatawan datang berwisata ke daerah tujuan wisata sebagai bagian dari gaya hidupnya, serta untuk menghadapi keberagaman wisata sejenis di Indonesia, menjaga dan melindungi kelestarian alam untuk mengimbangi pengembangan infrastruktur daerah tujuan wisata yang tidak berlandaskan kelestarian sumber daya alam.</p>
6.	<p>Daniel Anthoni Sihasale, L. Hakim, A. Suharyanto, Soemarno. <i>“The Strategy Of Potential Tourism Development In Namalatu Beach At Nusaniwe Sub District, Ambon City, Indonesia”</i> (2013)</p>	<p>Untuk menganalisis faktor internal yang mempengaruhi pengembangan objek wisata Pantai Namalatu, dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan Pantai Namalatu serta menganalisis alternatif strategis.</p>	<p>Lokasi objek wisata Pantai Namalatu di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon memiliki posisi yang sangat strategis yang tidak jauh dari pusat kota kota Ambon dan dekat pemukiman rakyat. Karakteristik sumber daya alam pantai sangat potensial dengan pemandangan alam dan pesisir yang indah. Struktur dan infrastruktur untuk transportasi umum adalah dapat diandalkan dan jalan menuju lokasi objek wisata tersedia dan juga dapat diandalkan. Keamanan dalam objek wisata adalah baik. Pengelolaan objek wisata Pantai Namalatu, belum maksimal untuk struktur tersebut dan infrastruktur tempat tinggal dan beribadah. Pemasaran dan promosi masih kurang, dan oleh karena itu, seharusnya ditingkatkan dengan memberikan paket pariwisata yang lebih modern dan ekstensif; dan Peran pemerintah lokal,</p>

			Pejabat dan investor terkait belum maksimal untuk pengembangan dan pengelolaan obyek wisata Pantai Namalatu.
7.	Achmad Fadillah, Triana G. Dewi, Arini Hardjanto “ <i>Analysis of Alternative Strategy in Coastal Tourism Development in Aceh Besar, Indonesia after Tsunami Disaster</i> ”. (2012)	Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk menganalisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan pariwisata di kabupaten Aceh Besar. 2. Untuk menganalisis faktor-faktor internal yang mempengaruhi pengembangan pariwisata di kabupaten Aceh Besar. 3. Untuk menganalisis strategi dan prioritas strategi itu dapat diusulkan untuk mengembangkan pariwisata pantai di Aceh Kabupaten besar.	Ada banyak faktor yang mempengaruhi pengembangan wisata pesisir di Aceh Besar, Indonesia. Dalam pengembangan wisata pesisir tersebut perlu diketahui faktor eksternal dan internal yang dapat mendukung atau menghambat pengembangan wisata pesisir di Aceh Besar. Tujuan dari penelitian ini adalah: menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan pariwisata di Aceh Besar, menganalisa faktor internal yang mempengaruhi perkembangan pariwisata di Aceh Besar, dan untuk menganalisis strategi yang ditujukan untuk mengembangkan wisata pesisir di Aceh Besar. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi IFE, EFE, dan SWOT. Berdasarkan strategi tersebut, dapat semakin meningkatkan dukungan pemerintah untuk pembangunan dan pengelolaan wisata pesisir di Aceh Besar.
8.	Rezarta Brokaj “ <i>Local Government’s Role in The Sustainable Tourism Development of a Destination</i> ” (2014)	Penelitian ini Membahas dua pertanyaan dasar yaitu apa yang dimaksud dengan menjadikan pariwisata lebih berkelanjutan dan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pariwisata manajemen menuju keberlanjutan	Industri pariwisata memainkan bagian penting dalam strategi pembangunan ekonomi di negara berkembang. Pariwisata di Kota Vlora, Albania, penting untuk dikembangkan dengan melihat peran, tanggung jawab, dan manfaat dari tiga <i>stakeholder</i> utama, yaitu pemerintahan lokal, perusahaan pariwisata, dan masyarakat setempat agar pengembangan pariwisata di Kota Vlora dapat berkelanjutan. Pembangunan pariwisata di Kota Vlora ini menggunakan analisis SWOT terutama berfokus pada tantangan dan kelemahan yang berkembang di dalam dan di luar batas pemerintahan daerah yang dapat menghambat peningkatan

			Kota Vlora sebagai tujuan wisata di Albania. Hasil penelitian ini menunjukkan fakta bahwa ada banyak sekali faktor yang menghambat industri pariwisata Kota Vlora. Semua faktor ini memainkan peran penting dalam mewujudkan tindakan pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan keberlanjutan pariwisata.
--	--	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai strategi pengembangan pariwisata, strategi untuk mengembangkan pariwisata pantai dapat terlihat bahwa terdapat beberapa aspek penting yang ada di dalamnya, antara lain terdiri dari :
potensi yang dimiliki oleh objek wisata

1. Persepsi dan aspirasi masyarakat
2. Fasilitas sarana dan prasarana
3. Wisata kuliner sebagai pelengkap wisata
4. Keterlibatan masyarakat
5. Pengelolaan sampah dan kebersihan
6. Posisi atau letak pariwisata yang strategis
7. Promosi
8. Keterlibatan pemerintah.

1.5.2 Administrasi Publik

Definisi Administrasi Publik menurut para ahli di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pfiffner dan Presthus dalam Syafiie (2010:23), Administrasi Publik adalah:

- a) Administrasi Publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
 - b) Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
 - c) Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.
2. Nigro dan Nigro dalam Syafiie (2010:24), menyebutkan definisi Administrasi Publik sebagai berikut :
- a) Administrasi Publik adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
 - b) Administrasi Publik meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan diantara mereka.
 - c) Administrasi Publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya mempunyai sebagian dari proses politik.
 - d) Administrasi Publik sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

- e) Administrasi Publik dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.
3. Chandler dan Plano dalam Keban (2008:3), administrasi publik adalah proses dari sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplemantasikan dan mengelola semua keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.
 4. Dimock, Dimock dan Fox dalam Keban (2008:5), administrasi publik adalah perencanaan produksi barang dan jasa untuk melayani dan memenuhi masyarakat.
 5. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia mendefinisikan administrasi publik sebagai seluruh penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan yang ada demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 (Ibrahim, 2012:16).

Berdasarkan pengertian Administrasi Publik yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa Administrasi Publik merupakan suatu kerjasama yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga dapat memenuhi kesejahteraan serta kebutuhan masyarakat atau publik berdasarkan kebijakan yang ada dalam rangka melaksanakan program-program pemerintah.

Nicholas Henry dalam Falih Suaedi (2010:5) menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) kelompok corak berpikir atau paradigma para pakar tentang keberadaan Ilmu Administrasi Publik, yaitu sebagai berikut :

1. Paradigma Dikotomi antara Politik dan Administrasi (1900-1926)

Goodnow dalam Anggara (2016:360) berpendapat bahwa terdapat dua fungsi berbeda dari pemerintah, politik harus berhubungan dengan kebijaksanaan atau masalah yang ada hubungannya dengan tujuan negara, sedangkan administrasi harus berkaitan dengan kebijaksanaan tersebut. Dengan kata lain administrator dianggap tidak perlu campur tangan dalam kegiatan dan proses politik yang berlangsung di suatu negara, dan secara spesifik tugas para administrator tersebut adalah sebagai pelaksana keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh para politisi, dengan ini administrasi publik disebut sebagai alat pemerintah.

Dalam paradigma ini, kata publik di dalam administrasi publik memiliki pengertian yang sama dengan birokrasi pemerintahan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan dan negara. Dengan demikian, administrasi publik dapat dipandang sebagai cara menjalankan birokrasi pemerintahan agar dapat bekerja sebagaimana mestinya.

2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma ini muncul akibat dari interaksi yang intensif antara para administrator dengan pihak politisi dan pihak swasta. Akibat dari interaksi ini, administrator dan ilmu administrasi diterima secara luas, baik di kalangan industri maupun pemerintah. Ciri dari paradigma ini adalah diserapnya prinsip-prinsip manajemen secara luas untuk diterapkan pada lingkup administrasi. Dalam periode ini juga muncul asumsi yang

dikemukakan oleh W. F. Willoughby dalam Suaedi (2010) bahwa prinsip-prinsip administrasi bisa dibuktikan dan dipelajari.

Dalam paradigma ini fokus dari ilmu administrasi dianggap lebih penting daripada lokusnya. Hal ini berakibat pada pengertian kata publik yang menjadi sangat luas yang hanya dibatasi oleh fokus ilmu administrasi, yaitu prinsip-prinsip manajemen seperti *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Hal ini berkonsekuensi pada masuknya administrasi publik pada ranah kajian yang belum pernah dimasukinya. Lokusnya kurang dipentingkan, sedangkan fokusnya adalah “prinsip-prinsip” manajerial yang dipandang berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan lingkungan budaya.

3. Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970)

Paradigma ini berusaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi publik dengan ilmu politik. Dalam paradigma ini, lokus ilmu administrasi publik berusaha untuk diredifinisikan atau diperbaharui kembali menjadi birokrasi pemerintahan. Hal ini berakibat pada kurang diperhatikannya fokus dari ilmu administrasi publik yang pada akhirnya berujung pada masalah “sibuk mendefinisikan” fokusnya.

Dalam paradigma ini jelas bahwa pengertian dalam kata publik yang diinginkan adalah yang berkenaan dengan birokrasi pemerintahan, sehingga ruang lingkup administrasi publik bisa dikatakan kembali menyempit ke seputar proses manajerial birokrasi pemerintahan. Administrasi negara kembali menjadi bagian dari ilmu politik.

Pelaksanaan prinsip-prinsip administrasi sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor lingkungan, jadi tidak “*value free*” (bebas nilai).

4. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya dikembangkan kembali secara ilmiah dan mendalam. Fokus dari paradigma ini adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, dan lain sebagainya. Paradigma ini pada dasarnya memiliki dua arah perkembangan, yaitu berorientasi pada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial dan berorientasi pada kebijakan publik.

5. Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970)

Dalam Suaedi (2010) dijelaskan bahwa dalam paradigma ini, lokus administrasi publik bukan hanya semata-mata pada ilmu murni administrasi, melainkan pada teori organisasi, yakni pada bagaimana dan mengapa organisasi-organisasi itu bekerja, bagaimana dan mengapa orang-orang berperilaku dalam organisasi, serta bagaimana dan mengapa keputusan-keputusan itu diambil. Selain hal tersebut, pertimbangan-pertimbangan untuk menggunakan teknik ilmu manajemen ke dalam lingkungan pemerintahan menjadi perhatian pula. Administrasi publik semakin bertambah perhatiannya terhadap wilayah ilmu kebijakan (*policy science*), politik ekonomi, proses pembuatan kebijakan pemerintah, dan analisisnya (*public policy making process*), dan cara-cara pengukuran dari

hasil-hasil kebijakan yang telah dibuat. Aspek-aspek perhatian ini dapat dianggap di dalam banyak hal sebagai rantai yang menghubungkan antara fokus administrasi publik dengan lokusnya.

Sebagaimana yang terlihat dalam *trend* yang diikuti oleh paradigma ini, maka fokus administrasi publik adalah teori organisasi, praktik dalam analisis kebijakan, dan teknik-teknik administrasi dalam manajemen. Adapun fokus normatif dari administrasi publik digambarkan oleh paradigma ini adalah pada birokrasi pemerintahan dan pada persoalan-persoalan masyarakat (*public affairs*).

Selain lima para paradigma tersebut, Nicholas Henry dalam Ikeanyibe (2017:6) memberikan pendapatnya mengenai adanya paradigma pemerintahan yang mulai berlaku pada 1990 hingga sekarang.

1. Paradigma Governance (1990-sekarang)

Tamayao dalam Ikeanyibe (2017:6) mendefinisikan bahwa paradigma ini merupakan bentuk pelatihan kekuasaan dan kewenangan oleh para pemimpin politik untuk mensejahterakan warga negaranya, suatu proses kompleks di mana beberapa sektor kekuatan masyarakat digunakan, serta menegakkan dan menyebarkan kebijakan publik yang secara langsung mempengaruhi manusia dan interaksi kelembagaan, serta ekonomi dan pembangunan sosial. Istilah “Governance” pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan proses dasar pemerintahan modern yang memiliki cara berbeda dengan “pemerintah” secara tradisional dalam beroperasi. Hal

tersebut terdiri dari proses politik yang luas di mana warga dan partisipasi kelompok dalam kebijakan dan program pemerintah sangat penting.

Paradigma ini menurut Ewalt dalam Ikeanyibe (2017:7) menjelaskan bahwa pemerintah perlu untuk melakukan pelimpahan dalam bentuk desentralisasi (pembagian kekuasaan dan fungsi) dalam hal modus pelayanan, unit analisis yang merupakan jaringan dari organisasi nirlaba, perusahaan swasta dan unit pemerintah lainnya. Bukan hanya itu saja, pemerintah dalam paradigma ini juga melaksanakan kerjasama dengan masyarakat, komunitas, hingga sektor swasta.

Pergeseran paradigma administrasi publik menyebabkan ilmu administrasi mempunyai dua fokus yaitu tentang kebijakan publik dan manajemen publik. Kebijakan dan manajemen merupakan sesuatu yang saling berkaitan karena kebijakan publik harus mampu menjawab kepentingan dan kebutuhan masyarakat sedangkan dari sisi manajemen publik berfungsi untuk melaksanakan suatu kebijakan seperti program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen publik. Manajemen sebagai salah satu dimensi administrasi publik berkenaan dengan bagaimana menerapkan prinsip – prinsip manajemen untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik.

1.5.3 Manajemen Publik

Overman dalam Keban (2008:92) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah *scientific management*, manajemen publik bukan *policy analisis*, bukan juga administrasi publik. Akan tetapi manajemen publik merefleksikan tekanan-

tekanan orientasi *rational-instrument* pada satu pihak dan orientasi publik di pihak lain.

Matteson dan Ivancevich dalam Rifa'I dan Fadhli (2013:14) mengemukakan bahwa "*Management as a process of getting things done through and with people operating in organize group*". Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa manajemen adalah proses melakukan usaha memperoleh tindakan melalui pekerjaan orang dalam kesatuan kelompok.

Dalam makna yang hampir sama, Mondy dan Premeaux dalam Rifa'I dan Fadhli (2013:14) menjelaskan pendapatnya bahwa: "*management is the process of getting things done through the efforts of other perople*". Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa manajemen adalah proses memperoleh suatu tindakan melalui usaha orang lain.

Luther Gullick dalam Handoko (2012:11) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan serta membuat sistem kerjasama yang bermanfaat untuk manusia. Keseluruhan sumber daya yang ada di organisasi membutuhkan adanya proses pengaturan atau manajemen. Adanya manajemen, pemanfaatan sumber daya seperti manusia dan mesin dapat dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Wijaya (2014:1), manajemen publik fokus pada internal organisasi sektor publik, yaitu bagaimana mengatur organisasi sektor publik bekerja dengan optimal untuk mencapai tujuan. Namun demikian, organisasi

sektor publik juga tidak begitu saja mengabaikan realitas eksternal organisasi sektor publik yang selalu dipengaruhi oleh kebijakan publik dan kepentingan politik, sebagai ciri khas yang dimiliki oleh organisasi sektor publik.

Menurut Ott, Hyde, dan Shafritz dalam Safrony (2012:89) mengatakan bahwa manajemen publik memfokuskan pada alat-alat manajerial, teknik-teknik, ilmu pengetahuan, dan keahlian yang dapat digunakan untuk menerapkan ide-ide dalam kebijakan ke dalam program-program tindakan. Secara spesifik manajemen publik memfokuskan pada bagaimana organisasi publik mengimplementasikan kebijakan publik. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan merupakan perangkat utama yang dilakukan oleh manajer publik dalam rangka menyelenggarakan pelayanan pemerintahan.

Berdasarkan pada beberapa pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa manajemen publik merupakan suatu ilmu dalam administrasi publik yang lebih memfokuskan tentang cara untuk melaksanakan kebijakan publik yang telah disusun melalui prinsip dan fungsi-fungsi manajemen yang telah ada.

Terdapat fungsi-fungsi manajemen yang merupakan serangkaian kegiatan yang dijalankan berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. fungsi manajemen telah banyak dipaparkan oleh para ahli manajemen. Menurut George R.Terry dalam Azwir Syahputra (2016:5), prinsip-prinsip manajemen terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*), merupakan suatu proses menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai

hasil-hasil yang dikendaki, di mana dalam merumuskan suatu perencanaan harus dihubungkan dengan kenyataan yang ada dan terjadi. Suatu perencanaan yang baik, haruslah mengandung formulasi 5W + 1H yaitu *What* (apa), *Who* (siapa), *Where* (dimana), *When* (kapan), *Why* (mengapa), *How* (bagaimana). Disamping itu perencanaan yang baik haruslah terdapat unsur-unsur yaitu adanya penyusunan rencana kerja dan penerapan tujuan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*), merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan. Di dalam suatu organisasi terdapat beberapa unsur yaitu adanya perincian kerja, penempatan dan pembagian tugas.
3. Pelaksanaan (*Actuating*), merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenaan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Supaya pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan lancar maka diperlukan beberapa hal yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan/pekerjaan yaitu adanya kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi.
4. Pengawasan (*Controlling*), merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan

maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dalam hal ini proses pengawasan ada tiga tahap yaitu menetapkan standar, melakukan penilaian, serta mengadakan tindakan perbaikan.

Dalam perkembangan ilmu manajemen, terdapat beberapa kajian khusus mengenai cabang dari ilmu manajemen. Salah satu kajian dari ilmu manajemen adalah manajemen strategis. Manajemen strategis mulai diterapkan pada sektor publik karena merupakan suatu kebutuhan yang diterapkan ke dalam rencana-rencana strategis untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan.

1.5.4 Manajemen Strategis

Sondang P Siagian (2005:15) dalam buku “Manajemen Strategi” mengatakan bahwa manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.

Sementara itu, Stainer dalam Handoko (2015:92) menjelaskan bahwa perencanaan strategis (*strategic planning*) adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi dan kebijaksanaan dalam program-program strategik serta metode-metode yang ditetapkan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan dapat diimplementasikan.

Adapun Hunger, J David dan Wheelen, Thomas L dalam Triton PB (2007:35), manajemen strategis merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja suatu organisasi dalam cakupan jangka panjang.

Menurut Schuler. R.S dalam Yunus (2016:5), manajemen strategis didefinisikan sebagai titik temu yang dirumuskan suatu organisasi antara sumber daya dan keahlian internalnya serta kesempatan dan risiko yang terbentuk melalui lingkungan eksternalnya. Terdapat tiga tahap manajemen strategis yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Pada formulasi strategi, terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan. Menurut Riva'i tahap formulasi strategi terdapat pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan (dalam Edy Yunus, 2016:15).

Menurut Fred R. David dalam Suedi (2019:17) manajemen strategis merupakan seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Manajemen strategi merupakan suatu rangkaian proses pengambilan keputusan strategi yang meliputi kerangka perumusan (*formulating*), pelaksanaan (*implementing*), serta evaluasi (*evaluating*). Proses manajemen strategi ini meliputi rencana-rencana jangka panjang maupun pendek untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam perencanaan strategis akan menghasilkan strategi yang dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. Strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumberdaya yang

mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal tersebut (Bryson, 2016:189).

Setiap strategi yang efektif akan dibangun atas kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang sembari meminimalkan atau mengatasi kelemahan dan ancaman (Bryson, 2016:66). Dukungan dan komitmen dari para pembuat keputusan baik dari pihak internal maupun eksternal tentang seluruh upaya perencanaan strategis sangat penting jika perencanaan strategis ingin berhasil (Bryson, 2016:56)

Konsep manajemen strategis pada dasarnya berlaku umum, dalam artian bahwa manajemen stratejis dapat diimplementasikan ke dalam semua organisasi baik instansi pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan dengan mengelola dan mengolah faktor-faktor strategis yang ada dalam jangka panjang. Terdapat tiga tahap manajemen strategis yaitu formulasi, implementasi serta evaluasi. Pada formulasi strategi, terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan seperti pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.

1.5.5 Analisis Lingkungan Strategis

Badrudin (2017:100) mengemukakan bahwa analisis lingkungan memiliki tujuan untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu lingkungan, demografis, politik, sosial dan ekonomi yang akan memengaruhi suatu organisasi. Dengan memahami visi-misi dan strategi organisasi maka dapat melihat adanya

pengaruh yang mempunyai efek yang paling besar terhadap organisasi. Dalam lingkungan strategik terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Menurut Hubeis dan Najib (2014:32) tujuan analisis lingkungan yaitu:

1. Untuk menyediakan kemampuan menanggapi masalah-masalah dalam lingkungan bagi manajemen organisasi
2. Untuk menyelidiki kondisi masa depan lingkungan organisasi dan memasukkannya ke pengambilan keputusan organisasi
3. Untuk mengenali masalah-masalah mendesak saat ini terjadi.

Rangkuti dalam Tangkilisan (2005:258) mengatakan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi yang dapat ditentukan melalui dua faktor yaitu faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal. Alat analisis yang biasa digunakan dalam analisis ini adakah analisis SWOT. Penjelasan terhadap kedua lingkungan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan analisis organisasi untuk menilai atau mengidentifikasi *kekuatan (strength)* dan kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi. Proses analisis lingkungan internal merupakan proses yang penting karena dengan mengidentifikasi analisis lingkungan internal akan diketahui kekuatan dan kelemahan dan selanjutnya digunakan untuk mengetahui isu-isu strategis (Rangkuti 2005:19). Faktor-faktor yang tercakup dalam lingkungan internal adalah adanya visi-misi, sumber daya, fasilitas sarana dan prasarana serta anggaran

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar organisasi. Terdapat dua faktor di dalam lingkungan eksternal, yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Faktor-faktor yang terdapat dalam lingkungan eksternal meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, partisipasi masyarakat, teknologi serta keterlibatan stakeholder.

1.5.6 Alat Analisis dalam Perencanaan Strategis

Analisis SWOT merupakan sarana alat bantu bagi perencana strategi untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang telah ditentukan untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan analisis SWOT adalah dengan melakukan analisis dan diagnosis lingkungan baik lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Analisis lingkungan merupakan suatu proses monitoring yang dilakukan oleh penyusun strategi terkait sektor-sektor lingkungan untuk menentukan kesempatan kegiatan (peluang) dan ancaman-ancaman bagi suatu organisasi, sedangkan diagnosa lingkungan berisi tentang keputusan manajerial yang dibutuhkan dengan cara menilai signifikan data kesempatan dan ancaman dari analisa lingkungan (Yunus, 2016:83)

Menurut Freddy Rangkuti (2005) Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Analisis ini didasarkan oleh

analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Analisis internal meliputi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) sedangkan analisis lingkungan eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

1. Kekuatan (*Strengths*) merupakan sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing dan kebutuhan pelanggan yang dapat dilayani oleh organisasi yang diharapkan dapat melayani. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Hal yang perlu dilakukan didalam analisis ini adalah setiap organisasi perlu menilai kekuatan-kekuatan yang ada. Kekuatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menambah nilai dan kemajuan organisasi. Kekuatan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kelemahan. Elemen yang penting di pandang sebagai kekuatan antara lain yaitu, struktur organisasi yang tangguh; penjabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas; misi, tujuan, dan sasaran yang jelas untuk melaksanakan tujuan organisasi; kompetensi sumber daya organisasi yang bernilai; sumber daya keuangan yang cukup untuk pengembangan yang direncanakan; saran dan prasarana yang sudah baik; dan organisasi yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
2. Kelemahan (*Weakness*) merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja organisasi. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan manajemen dan keterampilan pegawai organisasi dapat merupakan sumber dari kelemahan

organisasi. Kelemahan itu sangat dominan, ada kemungkinan kekuatan yang dimiliki organisasi berubah menjadi kelemahan. Kelemahan suatu organisasi misalnya tidak adanya tenaga profesional yang tersedia; kurangnya dana untuk mendukung berbagai program yang direncanakan; organisasi tidak memiliki tujuan dan sasaran; struktur organisasi yang tidak teratur; tidak ada kejelasan tanggung jawab; kondisi politik yang kacau balau; fasilitas teknologi yang sangat langka; tidak memiliki keterampilan tertentu; kurangnya pengetahuan, pengalaman yang mendalam tentang manajemen; dan sangat lemah dalam penyimpanan data dan informasi. Organisasi dapat memaksimalkan kekuatan untuk mengurangi kelemahan yang dimiliki.

3. Peluang (*Opportunities*) merupakan situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan organisasi yang membantu untuk mencapai atau bahkan melampaui pencapaian sarannya. Kecendrungan-kecendrungan penting merupakan salah satu sumber peluang, seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara organisasi sebagai pelayan dengan masyarakat sebagai pelanggan merupakan gambaran peluang bagi organisasi. Apabila terjadi perubahan mungkin diperlukan perubahan tujuan dan sasaran organisasi. Apa yang dianggap peluang bagi organisasi yang satu belum tentu merupakan peluang bagi organisasi yang lain, dan apa yang merupakan peluang pada saat ini belum tentu akan tampil sebagai peluang pada kesempatan lain. Peluang suatu organisasi yaitu kebijakan pemerintah yang memberi keuntungan bagi organisasi;

pertumbuhan ekonomi yang cepat sekaligus menaikkan pendapatan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru yang akan menguntungkan organisasi.

4. Ancaman (*Threats*) adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan organisasi. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan organisasi. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang baru atau yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi kesuksesan organisasi. Apabila dalam suatu organisasi mengalami perubahan yang penting mungkin diperlukan perubahan tujuan dan sasaran organisasi. Hubungan-hubungan yang berubah itu dapat menciptakan ancaman bagi organisasi. Ancaman atau rintangan bagi suatu organisasi tertentu belum tentu dianggap sebagai ancaman oleh organisasi lain, ancaman pada satu saat tidak selamanya merupakan ancaman di kemudian hari. Ancaman bagi organisasi seperti inflasi, resesi ekonomi, perubahan mendadak kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi yang tidak menguntungkan, krisis politik yang sangat serius, pertentangan antar golongan yang terus-menerus, perubahan kekuasaan, pemberontakan, kerusuhan, peperangan, dan bencana alam. Organisasi dapat memanfaatkan peluang untuk menghilangkan ancaman.

Matriks SWOT dapat digunakan untuk memudahkan dalam menganalisis SWOT. Matriks ini dinilai mampu menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh organisasi yang dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang ada. Matriks ini dapat

menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategik untuk mempermudah merumuskan strategi. Berikut adalah matriks analisis SWOT:

Tabel 1. 4

Matriks Analisis SWOT

Faktor Internal	Strengths (S) Menentukan beberapa faktor yang merupakan kekuatan internal	Weakness (W) Menentukan beberapa faktor yang menjadi kelemahan internal
Faktor Eksternal	Strategi SO Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (<i>Comparative Advantage</i>)	Strategi WO Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (<i>Investment Divestment</i>)
Opportunities (O) Menentukan beberapa faktor yang di anggap sebagai peluang	Strategi ST Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (<i>Mobilization</i>)	Strategi WT Meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman (<i>Damage Control</i>)
Threats (T) Menentukan beberapa faktor yang dinilai sebagai ancaman		

Sumber: Kurniawan dan Hamdani (2008:71)

a. Strategi SO

Strategi SO diperoleh dari *strength* dan *opportunity*. Strategi ini disebut dengan *comparative advantage* (keunggulan komparatif). Strategi SO dibuat berdasarkan tujuan organisasi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk mendapatkan peluang sebesar-besarnya.

b. Strategi ST

Strategi ST diperoleh dari *strength dan threats* serta strategi ini disebut dengan *mobilization*. Strategi ST merupakan strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi untuk mengatasi ancaman.

c. Strategi WO

Strategi WO diperoleh dari *weakness* dan *opportunity* serta strategi ini disebut dengan *investment divestment*. Strategi WO diperoleh berdasarkan hasil dari memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan yang ada.

d. Strategi WT

Strategi WT diperoleh dari *weakness* dan *threats* serta strategi ini disebut dengan *damage control*. Strategi WT didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif serta berusaha meminimalkan atau mengurangi kelemahan yang ada untuk menghindari ancaman.

1.5.7 Pariwisata

Istilah pariwisata telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mengartikan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh segala fasilitas dan layanan yang telah disediakan oleh berbagai pihak yang terdiri dari masyarakat, pengusaha, Pemerintah, maupun Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Pitana dan Gayatri (2005:44-45) dalam buku “Sosiologi Pariwisata” mengemukakan definisi pariwisata menurut beberapa ahli yaitu :

“Tourism is the sum total of the phenomena and relationship arising from the interaction among tourist, business suppliers, host governments, universities, communities, origin governments, universities, community collages and non-governmental organizations, in process of attracting, transporting, hosting, and managing these tourists and other visitors”.(Weaver Opperman, 2000:3)

“Tourism becomes absolutely everything associable with acts of tourist, or to put into its proper tautological form, ‘tourism is tourism’ or ‘tourism is what tourists do’” (Franklin, 2003:28)

“Tourism comprises the activities of persons, traveling to and staying in the place outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes”(Richardson dan Fluker 2004:7).

Beberapa komponen pokok yang secara umum disepakati di dalam memberikan batasan mengenai pariwisata (khususnya pariwisata internasional), yaitu sebagai berikut (WTO dalam Pitana 2009:46) :

1. *Traveler*, yaitu orang yang melakukan perjalanan antar dua atau lebih lokalitas.
2. *Visitors*, yaitu orang yang melakukan perjalanan ke suatu daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan serta tujuan perjalanannya bukan untuk terlibat dalam kegiatan untuk mencari nafkah, pendapatan, atau penghidupan di tempat tujuan.
3. *Tourist*, yaitu bagian dari *visitors* yang menghabiskan waktu paling tidak satu malam (24 jam) di daerah yang dikunjungi.

Semua definisi yang dikemukakan tentang pariwisata , meskipun berbeda tetapi selalu mengandung unsur-unsur pokok, yaitu :

1. Adanya unsur perjalanan, yaitu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya;
2. Adanya unsur ‘tinggal sementara’ di tempat yang bukan merupakan tempat tinggal yang biasanya; dan
3. Tujuan utama dari pergerakan manusia tersebut bukan mencari penghidupan/pekerjaan di tempat yang dituju.

1.5.7.1 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan destinasi pariwisata membutuhkan suatu teknik perencanaan yang tepat. Teknik pengembangan harus mampu menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah aspek aksesibilitas yang meliputi transportasi dan saluran pemasaran, karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan dengan sektor lain, tingkat resistensi komunitas lokal, dan sebagainya.

Pitana (2009:134) mengemukakan bahwa beberapa teknik yang digunakan dalam pengembangan destinasi pariwisata antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Carrying Capability*

Konsep daya dukung (*Carrying Capability*) lebih mudah untuk didefinisikan apabila dibandingkan dengan mengukurnya. Salah satu cara untuk memecahkan masalah ini adalah dengan melibatkan peran masyarakat dalam pengukurannya, yaitu dengan menggunakan kuesioner.

2. *Reactional Carrying Capacity (RCC)*

RCC merupakan model utama untuk mengelola dampak akibat kunjungan wisata. Dampak dari pembangunan dan pengembangan pariwisata (baik tipe, lokasi, dan kualitasnya). Penentuan RCC bersifat subjektif sebab sebuah destinasi memiliki kapasitas potensial yang berbeda.

3. *Reactional Opportunity Spectrum (ROS)*

ROS merupakan teknik identifikasi karakteristik dari suatu kawasan atau destinasi dengan pengaturan yang inasberbeda dan memadukannya dengan peluang rekreasi untuk mendapatkan keuntungan bagi pengguna destinasi

dan lingkungan. Terdapat enam faktor yang dapat digunakan untuk menentukan kondisi dan karakteristik suatu wilayah berdasarkan konsep ROS yaitu :

- a) Akses
- b) Penggunaan di luar kepentingan pengembangan untuk kawasan rekreasi
- c) Manajemen dan prasarana yang ada
- d) Interaksi sosial
- e) Level penerimaan akan dampak kunjungan
- f) Level penerimaan akan manajemen kontrol

4. *Tourism Opportunity Spectrum (TOS)*

TOS menganut asumsi bahwa spectrum pengukuran dan penilaian indikator perencanaan yang digunakan haruslah :

- a) Dapat diamati dan diukur
- b) Secara langsung dapat dikendalikan di bawah manajemen kontrol
- c) Terkait langsung dengan preferensi wisatawan dan mempengaruhi keputusan untuk melakukan wisata atau tidak ke tempat tersebut
- d) Mempunyai karakteristik dengan kondisi tertentu

Elemen-elemen dalam konsep TOS adalah sebagai berikut :

- a) Aksesibilitas
- b) Kompatibilitas dengan kegiatan lain
- c) Karakteristik sarana pariwisata
- d) Interaksi sosial

- e) Tingkat akseptabilitas komunitas lokal terhadap wisatawan
- f) Derajat manajemen control

1.5.7.1 Komponen – Komponen Pengembangan Destinasi Pariwisata

Sunaryo (2013:25) mengemukakan komponen-komponen yang penting untuk diperhatikan dalam pengembangan destinasi pariwisata (*tourism product designing*) adalah sebagai berikut :

1. Atraksi dan daya tarik wisata

Secara sederhana atraksi dan daya tarik wisata seringkali diklasifikasikan pada jenis dan temanya, biasanya dibagi menjadi tiga jenis tema daya tarik wisata yang meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata minat khusus. Berbagai jenis atraksi dan daya tarik wisata tersebut mempunyai kedudukan yang sangat penting pada sisi produk wisata, terutama dalam rangka menarik kunjungan wisatawan ke destinasi. Ketiga jenis daya tarik wisata secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Daya tarik wisata alam

Daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada anugrah keindahan dan kenikmatan yang telah tersedia di alam, seperti :

- a) Pantai dengan keindahan pasir putihnya, deburan gelombang ombak serta akses padangannya terhadap matahari terbit atau tenggelam

- b) Laut dengan aneka kekayaan terumbu karang maupun ikannya
 - c) Danau dengan keindahan panoramanya
 - d) Gunung dengan daya tarik *volcano* nya
 - e) Hutan dan sabana dengan keaslian flora dan fauna
 - f) Sungai dengan kejernihan air dan kedahsyatan arusnya
 - g) Air terjun dengan panorama kecuramannya
- b. Daya tarik wisata budaya

Daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada hasil karya dan cipta manusia, baik yang berupa peninggalan budaya (situs/heritage) maupun yang nilai budaya masih hidup (the living culture) dalam kehidupan di suatu masyarakat, yang dapat berupa : acara/ritual, adat istiadat, seni-pertunjukan, seni kriya, seni sastra maupun seni rupa maupun keunikan kehidupan sehari-hari yang dipunyai oleh suatu masyarakat. Beberapa contoh daya tarik wisata budaya di Indonesia banyak dikunjungi wisatawan adalah situs. Situs merupakan warisan budaya yang berupa : benda, bangunan, kawasan, struktur, dsb). Contohnya seperti museum, desa tradisional, kawasan kota lama, monument nasional, sanggarsei, pertunjukan, festival.

c. Daya Tarik Wisata Minat Khusus

Daya tarik wisata minat khusus (*special interest*) adalah daya tarik yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada aktivitas untuk pemenuhan keinginan wisatawan secara spesifik, seperti memancing (*fishing*), berbelanja (*shopping*), wisata agro, kesehatan dan penyegaran badan (*spa and rejuvenation*), dan aktivitas-aktivitas wisata minat khusus lainnya yang biasanya terkait dengan hobi atau kegemaran seseorang wisatawan.

2. Amenitas atau Akomodasi

Fasilitas amenities dan akomodasi adalah berbagai jenis fasilitas dan kelengkapannya yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk beristirahat dan bersantai dengan nyaman serta menginap selama melakukan kunjungan ke suatu destinasi.

3. Aksesibilitas dan Transportasi

Aksesibilitas dan transportasi adalah segenap fasilitas dan moda angkutan yang memungkinkan dan memudahkan serta membuat nyaman wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi serta berfungsi sebagai sarana dan fasilitas pendukung bagi pergerakan wisatawan dari suatu tempat ke tempat lainnya.

4. Infrastruktur Pendukung

Infrastruktur pendukung adalah keseluruhan jenis fasilitas umum yang berupa prasarana fisik seperti komponen pendukung perhubungan seperti pelabuhan (*seaport*), bandara (*airport*), stasiun kereta api dan jaringan

telekomunikasi serta beberapa fasilitas fisik lain seperti jaringan listrik, air minum, toilet, dan sebagainya.

5. Fasilitas Pendukung Wisata Lainnya

Fasilitas pendukung wisata lainnya adalah jenis fasilitas pendukung kepariwisataan yang berfungsi memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan selama melakukan kunjungan di suatu destinasi, seperti keamanan, rumah makan, biro perjalanan, toko cinderamata, dan beberapa skema kebijakan khusus yang diadakan untuk mendukung kenyamanan bagi wisatawan dalam kunjungannya di destinasi.

6. Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Pariwisata

Kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata adalah keseluruhan unsur organisasi atau institusi pengelola kepariwisataan dan termasuk sumber daya manusia pendukungnya, yang terkait dengan manajemen pengelolaan kepariwisataan di suatu destinasi, baik unsure Pemerintah, Swasta/Industri dan Masyarakat.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan salah satu unsur pokok dalam penelitian supaya persoalan utama yang akan diteliti dapat dibahas dengan lebih fokus. Permasalahan utama yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi pengembangan pariwisata Pantai Glagah Wangi di Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Analisis lingkungan strategi yang digunakan adalah menggunakan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal

a. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal adalah analisis organisasi secara internal dalam rangka menilai atau mengidentifikasi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi. Faktor yang tercakup dalam lingkungan internal adalah :

- a) Adanya visi dan misi organisasi
- b) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
- c) Ketersediaan sarana dan prasarana
- d) Ketersediaan anggaran

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang merupakan kekuatan yang berada di luar organisasi, dimana organisasi tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadapnya. Terdapat dua faktor di dalam lingkungan eksternal, yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Faktor yang tercakup dalam lingkungan eksternal adalah :

- a) Faktor ekonomi
- b) Faktor politik
- c) Faktor sosial budaya
- d) Partisipasi masyarakat
- e) Teknologi
- f) Keterlibatan stakeholder

c. Analisis Isu Strategis

Analisis isu strategis dilihat dari faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dianalisis menggunakan matriks SWOT sehingga memperoleh isu-isu strategis dan tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi isu strategis dengan menggunakan tes uji litmus.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Pasolong (2012:75) menjelaskan bahwa di dalam melakukan penelitian pada umumnya dapat digolongkan ke dalam tiga jenis penelitian, yaitu:

- a. Penelitian Deskriptif
- b. Penelitian Eksploratif
- c. Penelitian Ekspanatori

Penelitian ini menggunakan tipe desain penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian Deskriptif merupakan suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian, di dalamnya terdapat dua upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang didapatkan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang memberikan gambaran secara tepat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini dilakukan. Lokus penelitian ini terdapat di Dinas Pariwisata Kabupaten Demak dan BUMDes Istambul karya di Desa Tambakbulusan. Lokus tersebut dipilih karena berperan dalam proses Pengembangan Pariwisata Pantai Glagah Wangi Desa Tambakbulusan, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak.

1.7.3 Subyek Penelitian

Arikunto (2013: 152) menjelaskan bahwa subjek penelitian merupakan suatu hal memiliki kedudukan penting dalam suatu penelitian, subjek penelitian harus ditata terlebih dahulu sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Pada dasarnya subjek penelitian adalah manusia atau apa saja yang menjadi urusan manusia.

Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu berupa teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan tertentu. Di dalam penelitian ini yang menjadi narasumber penelitian yaitu:

No	Narasumber	Jumlah
1	Dinas Pariwisata Kabupaten Demak	2
2	BUMDes Istambul Karya Tambakbulusan	1
3	Masyarakat Desa Tambakbulusan	1
4	Pengunjung Pantai Glagah Wangi	2
Jumlah Narasumber		6

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

Lofland dan Lofland dalam Moleong (2009:157) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam suatu penelitian kualitatif terdiri dari kata-kata dan tindakan, kemudian selebihnya adalah data tambahan dari dokumen dan lain-lain.

Sugiyono (2015:137) menjelaskan bahwa pengumpulan data dapat menggunakan dua sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data-data primer diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan dalam wawancara atau pengamatan secara langsung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Peneliti hanya meminjam data tersebut sesuai dengan kebutuhan peneliti. Data sekunder berisi catatan mengenai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi berupa tulisan dari buku, dokumen, internet, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2015:224) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan tahap yang strategis dalam suatu penelitian karena tujuan teknik pengumpulan data adalah untuk memperoleh data yang diinginkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan yang didasarkan pada pengalaman secara langsung. Teknik ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mencatat, menganalisis, dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang perilaku objek yang diamati.

Pada penelitian ini observasi dilakukan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Demak untuk mengetahui dan mendeskripsikan program dan strategi yang dilakukan, orang yang terlibat di dalamnya, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku tentang fenomena yang bersangkutan dalam upaya pengembangan Pariwisata Pantai Glagah Wangi di Desa Tamakbulusan. Selain itu observasi juga dilakukan pada BUMDes Istambul Karya di Desa Tambakbulusan sebagai pihak yang mengelola Pantai Glagah Wangi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Penelitian ini menggunakan wawancara terbuka, yaitu di mana para terwawancara mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara tersebut.

Pada penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, BUMDes Istambul Karya di Desa Tambakbulusan, Masyarakat Desa Tambakbulusan serta pengunjung Pantai Glagah Wangi.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data berupa gambar-gambar, dokumen resmi, ataupun data resmi yang didapatkan dari berbagai sumber.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan mencari berbagai referensi dan literatur yang dapat berupa buku, jurnal, peraturan daerah, undang-undang yang sesuai dengan topik penelitian.

1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data

Sugiyono (2015:244) menjelaskan bahwa analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data yang disusun secara sistematis melalui hasil dari wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data sesuai kategori (jenis), kemudian menjabarkan ke dalam unit-unit, serta menyusun ke dalam pola, dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, sehingga kesimpulan dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif yaitu data yang telah terkumpul dianalisa melalui tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan dicari tema dan polanya.

Dengan demikian, reduksi data merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan pengabstrakkan informasi data yang muncul dari hasil penelitian di lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun dalam penelitian ini lebih menekankan pada bentuk penyajian yang bersifat deskriptif.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Verifikasi merupakan langkah terakhir dalam analisa data kualitatif. Penarikan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan di lapangan, penyimpanan, kecakapan, dan kejelian dalam menganalisa data, sehingga dapat menentukan suatu kajian yang lebih akurat dan menghasilkan suatu kesimpulan yang spesifik dari hasil kumpulan catatan di lapangan.

Dalam pengambilan keputusan, dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan, maka dapat diketahui isu-isu strategi dan untuk mengukur tingkat kestrategisan dari isu-isu tersebut, dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Tes Uji Litmus.

Menurut Bryson (2016:184) Uji Litmus berguna untuk mengembangkan seberapa ukuran tentang bagaimana strategisnya isu tersebut. Uji Litmus digunakan untuk menyaring isu-isu strategis sehingga isu strategis tersebut dapat

digunakan untuk mengetahui dan menghitung isu yang benar-benar strategis adalah isu yang memiliki skor tinggi pada semua dimensi, sedangkan isu yang operasional adalah isu dengan skor rendah dalam semua dimensi. Berikut ini adalah daftar pertanyaan dalam Uji Litmus.

Tabel 1. 5

Daftar Pertanyaan Uji Litmus

No	Pertanyaan	Skor		
		Operasional – Strategis		
		1	2	3
1.	Kapan tantangan atau peluang isu-isu strategis dihadapi oleh Organisasi?	Sekarang	Tahun Depan	Dua tahun atau lebih dari sekarang
2.	Seberapa luas isu berpengaruh pada organisasi ?	Unit/bagian tunggal	Beberapa bidang	Seluruh organisasi
3.	Seberapa besar risiko/ peluang keuangan bagi organisasi ?	Kecil (<10% dari anggaran)	Sedang (10-25% dari anggaran)	Besar (>25% dari anggaran)
4.	Apakah strategi bagi pemecahan isu akan memerlukan: a. Pengembangan sasaran dan program pelayanan baru? b. Perubahan signifikan dalam sumber atau jumlah pajak? c. Perubahan signifikan dalam ketetapan perubahan peraturan/perundangan? d. Penambahan atau perubahan fasilitas? e. Penambahan staff yang signifikan?	Tidak Tidak Tidak Tidak		Ya Ya Ya Ya
5.	Bagaimana pendekatan yang terbaik bagi pemecahan isu?	Jelas, siap diimplementasikan	Parameter luas, agak diperinci	Terbuka luas
6.	Tingkat keputusan manakah yang dapat menetapkan untuk menanggulangi isu?	Pengawas Staf Lini		Kepala Bagian

7.	Konsekuensi apa yang akan terjadi jika isu tersebut tidak ditangani?	Ada gangguan, tidak efisiensi	Kekacauan pelayanan, kehilangan sumber dana	Kekacauan pelayanan jangka panjang dan biaya besar/merosotnya penghasilan
8.	Seberapa banyak organisasi/instansi lain yang terlibat dalam pemecahan isu tersebut?	Tidak ada	Satu sampai tiga	Empat atau lebih
9.	Bagaimana sensitivitas isu ini terkait dengan nilai masyarakat, sosial, politik, agama, dan budaya?	Lunak	sedang	keras

Sumber : Bryson (2016:184)

Berdasarkan analisis SWOT dan Uji Litmus dapat menghasilkan isu-isu strategis dan kemudian dapat dirumuskan alternatif strategi-strategi dalam pengembangan pariwisata Pantai Glagah Wangi Desa Tambakbulusan Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak.

1.7.7 Kualitas Data

Menurut Sugiyono (2015:160), terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen yang telah menghasilkan data yang validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat.

Dalam analisis data, terdapat beberapa teknik yang dapat diterapkan dalam. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Triangulasi. Menurut Agustinova (2015:45) tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk

meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis maupun interpretatif dari sebuah riset. Agustinova (2015:47-49) mengemukakan bahwa terdapat empat macam triangulasi yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber Data (*Data Triangulation*)
2. Triangulasi Peneliti (*Multiple Triangulation*)
3. Triangulasi Teori (*Theory Triangulation*)
4. Triangulasi Metode (*Methodological Triangulation*)

Pada penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber pada penelitian ini yaitu dari pihak pemerintah dan dari masyarakat. Triangulasi sumber dari pemerintah yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Demak. Sedangkan triangulasi sumber dari masyarakat yaitu BUMDes Tambakbulusan, masyarakat Desa Tambakbulusan dan pengunjung Pantai Glagah Wangi.